



# BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 954/II/IV/2017 • APRIL 2017



## **KOMISI II DPR RI TETAPKAN KPU - BAWASLU 2017-2022**

4 DPR RI Dukung  
Anggaran dan Diplomasi  
Pemberantasan Narkoba

7 BKSAP Minta  
Bahrain Buka Kedubes  
di Indonesia



# Komisi II DPR RI Tetapkan KPU - Bawaslu 2017-2022

Hingga Rabu, (05/04) dini hari pukul 04.00 WIB, Komisi II DPR RI akhirnya telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 calon Anggota Badan Pengawas Pemilu. Dari total 24 calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 tersebut, Komisi II telah menetapkan 7 calon Anggota KPU dan 5 calon Anggota Bawaslu terpilih. Keputusan itu diambil usai melakukan *voting* terbuka di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

**K**etua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan hasil ini diserahkan kepada Bamus DPR RI pada Rabu 5 April 2017 untuk selanjutnya ditindaklanjuti pada pengambilan keputusan di Rapat Paripurna pada 6 April 2017. "Proses uji kelayakan dan kepatutan telah dilakukan sebagaimana aturan dan prosedur dalam UU No 15 Tahun 2011, dilaporkan ke Bamus dan akan dilaporkan resmi di Rapat Paripurna tanggal 6 April," jelas Amali.

"Hasil ini dilaporkan ke Bamus. Dengan demikian proses uji kelayakan dan kepatutan

calon anggota KPU dan Bawaslu di Komisi II yang berlangsung sejak Senin lalu hingga Rabu dini hari telah menghasilkan nama-nama sebagaimana yang ada," sambung Politisi Golkar ini.

Zainudin Amali mengharapkan keputusan Komisi II ini akan memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap proses berjalannya demokrasi di Indonesia. "Mudah-mudahan keputusan ini adalah keputusan terbaik yang diambil dan menjadi sumbangsih Komisi II pada perjalanan pemilu mulai sejak pilkada 2018 dan pemilu 2019. Semoga akan membawa perubahan yang lebih baik dan

kebaikan bangsa negara kita," terang Amali.

Berikut adalah nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana hasil *voting* Komisi II yakni, Pramono Ubaid Tanthowi (55 suara), Wahyu Setiawan (55 suara), Hasyim Asyari (54 suara), Ilham Saputra (54 suara), Viryan (52 suara), Evi Novida (48 suara), dan Arief Budiman (30 suara).

Selanjutnya 5 nama calon anggota Bawaslu terpilih berdasarkan *voting* yakni, Ratna Dewi Pettalolo (54 suara), Mochamad Affuiddin (52 suara), Rahmat Bagja (51 suara), Abhan (34 suara), dan Fritz Edward Siregar (33 suara). ■

(hs/sc) Foto : Jayadi/hr.



Anggota KPU - Bawaslu periode 2017-2022 berfoto bersama Pimpinan DPR RI



# Pencegahan Korupsi Harus dengan Cara Ilmiah

Dalam hal pemberantasan korupsi jangan terjebak dalam mitologi atau khayalan, karena korupsi itu sifatnya ilmiah, oleh karenanya cara mencegahnya juga harus dengan cara yang ilmiah. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah saat menjadi *keynote speak* dalam Seminar Nasional yang bertema "Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, legislatif Dan Yudikatif : Strategi Pencegahan Dan Penindakannya", yang digelar oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI, Kamis (30/03).



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah

“Kejahatan itu harus definitif, oleh karenanya seminar ini memiliki tugas yang berat. Kita harus memulainya dari awal yakni mengenai definisi, kesadaran umum kita, baru kemudian di ujungnya kita betul-betul punya cara menyusun statistik pemberantasan korupsi yang benar,” ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Fahri menegaskan, statistik pemberantasan korupsi itu bukan berdasarkan jumlah orang yang ditangkap, statistik pemberantasan korupsi efeknya adalah pada perbaikan sistem. Dengan perbaikan sistem itulah menjadi sumber kepercayaan orang kepada bangsa Indonesia.

"Keberanian orang untuk berinvestasi dan sebagainya adalah

bersumber dari kepercayaan kepada sistem nasional kita, terutama sistem hukum dan kepastian hukum," tandasnya.

Ia berharap ada seri dari diskusi dan seminar yang dimulai oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI tersebut, sehingga nantinya akan ada *blueprint* pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi dari DPR RI yang bisa disampaikan kepada masyarakat.

"Inilah temuan DPR RI baik secara ilmiah maupun melalui data-data lapangan yang ada, serta statistik bahwa peta dari persoalan korupsi kita di seluruh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu menjadi lebih terang. Sehingga cara kita memberantasnya juga lebih terang," pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto : lqba/hr

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Bagus Mudjiharjanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Elendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,  
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadliah

**ADMINISTRASI FOTO**  
Hasri Mentari

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



**PENERBITAN**  
Pimpinan Penerbitan  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**Penanggung Jawab Produksi**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**Staf Produksi**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

**Distribusi dan Sirkulasi**  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**Koordinator**  
Mujiono

**Staf Distribusi dan Sirkulasi**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah, Oji

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

# DPR RI Dukung Anggaran dan Diplomasi Pemberantasan Narkoba

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pemberantasan narkoba yang telah menjalar di berbagai wilayah Indonesia. Bentuk dukungan yang diberikan berupa dukungan terhadap berbagai program Badan Narkotika Nasional (BNN), peningkatan anggaran, hingga diplomasi antar negara.

Demikian dikatakan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, saat bincang Coffee Morning membahas Solusi Nasional dengan tema 'Indonesia Darurat Narkoba' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/03).

Acara itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Ketua Bangkar Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, dan Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir. Acara ini di moderatori oleh Anggota DPR RI periode 2009-2014, Dedi 'Miing' Gumelar. Selain itu hadir pula perwakilan artis seperti Ivan Slank dan Jenny Cortez.

"Peredaran narkoba ini telah menyentuh lapisan atas, khususnya *public figure*. Bahkan anak-anak dan ribuan orang saat sekarang terkena narkoba. Kita dukung apa yang harus dilakukan BNN. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah dengan persetujuan DPR RI, diharapkan memberikan arti besar dalam pemberantasan narkoba," jelas Novanto.

Menanggapi adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN, Novanto memastikan pihaknya akan mendukung peningkatan anggaran BNN. "Terkait anggaran, kami harapkan Ketua BNN dapat menjelaskan kepada Presiden terkait keterbatasan anggaran. Kami prioritaskan anggaran kepada BNN," imbuh Novanto.

Politisi F-PG itu menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dari



Ketua DPR RI Setya Novanto, usai bincang *Coffee Morning* membahas Solusi Nasional dengan tema 'Indonesia Darurat Narkoba' bersama Kepala BNN

peredaran narkoba yang telah diungkap BNN, dengan penyitaan aset mencapai Rp 263 miliar, berasal dari 21 kasus dari 30 tersangka.

Untuk pemberantasan narkoba yang melibatkan beberapa negara, Novanto memastikan DPR RI yang telah menjalin kerjasama dengan parlemen negara sahabat, dapat memberikan fasilitas dukungan kepada BNN dalam memberantas narkoba.

"Kita juga harapkan kerjasama antara BNN, Polri, Bea Cukai dalam menyisir peredaran narkoba," harap politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Sementara itu, Miing, panggilan akrab Dedi mengatakan ada tiga hal memang

Terkait anggaran, kami harapkan Ketua BNN dapat menjelaskan kepada Presiden terkait keterbatasan anggaran. Kami prioritaskan anggaran kepada BNN

yang sedang mengancam sendi keutuhan NKRI sekarang ini. Pertama adalah korupsi. Kedua, terorisme, dan yang terakhir adalah narkoba.

Mantan Anggota Dewan itu menjelaskan, ibarat sebuah pohon, korupsi mencegah buah-buah bertumbuh, terorisme menebang batangnya. Akan tetapi, narkoba bak rayap yang menggerogoti akarnya sehingga tak bisa bertumbuh jadi batang dan daun yang rimbun apalagi berbuah.

Sementara itu, Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, ada 11 negara yang mendistribusikan narkoba ke Indonesia. Ke-11 negara itu memasok narkoba lewat dua negara transit, yaitu Malaysia dan Singapura.

"Ada 11 negara yang menyuplai ke negara kita. Semua muara akhirnya di Indonesia mereka melalui 2 negara subtransit yaitu Malaysia dan Singapura," jelas Budi.

Budi pun mengeluhkan mengenai masalah koordinasi dengan dua negara untuk memutus peredaran narkoba ini. Menurutnya, kendalanya adalah masalah dasar hukum di Malaysia dan Singapura yang menyatakan jaringan pemasok narkotika ke Indonesia tidak bisa ditindak selama tidak melakukan kejahatan di negara tersebut.

"Sampai hari ini saya tidak bisa bekerjasama dengan 2 negara itu dalam mengungkap jaringan besarnya yang secara pembuktian ada di Malaysia dan Singapura," kata Budi.

Dari dua negara tersebut, narkoba ini masuk lewat pulau dan pelabuhan tikus. Budi pun mengakui pengawasan untuk masalah ini masih lemah. "Secara geografis kita lemah. Karena banyak pulau dan banyak pelabuhan tikus. Mereka masuk dari berbagai penjuru. Evaluasi kita, menggambarkan narkotika peredarannya seperti ini," imbuh Budi.

Budi mengakui, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia sebagian besar menjadi pusat kendali peredaran narkoba. Lapas telah dijadikan pusat kendali peredaran gelap narkoba. Sejauh ini, BNN berhasil mengungkap 72 jaringan, sebagian besar dikendalikan narapidana dari dalam lapas.

"Ancamannya luar biasa, masa depan generasi muda jadi taruhan. BNN berharap tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan ke pundak instansinya dan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri dan Kejaksaan. Melainkan bisa seluruh kalangan bahu membahu memberantas peredaran narkoba di Indonesia," harap Budi, sembari mengatakan pihaknya sedang merintis Pusat Rehabilitasi Nasional.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ivan Slank dan Jenny Cortez sempat menyampaikan pengalamannya ketika menjadi penyalahguna narkoba. Namun keduanya bertekad untuk keluar dari jerat hitam dunia narkoba, dan berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. ■



(sf.mpi) foto: jaksa/hr

# Perlu Kebijakan Konkrit Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR RI meminta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merumuskan kebijakan yang kongkrit, rasional dan aplikatif untuk mengatasi defisit di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay

“Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DJSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (03/04).

Usulan kongkrit yang rasional dan dapat diaplikasikan, dinilai dapat menyelesaikan permasalahan defisit selama ini. Selain itu, Saleh meminta DJSN melakukan sinkronisasi regulasi tentang jaminan sosial yang ada, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan dan BPJS bidang Ketenagakerjaan.

"Karena kita melihat kinerja BPJS bidang Kesehatan dan BPJS bidang Ketenagakerjaan masih jalan di tempat, maka masukan dari DJSN akan menjadi referensi kita saat rapat dengan pihak terkait," kata Saleh dengan menambahkan, pihaknya akan meminta pimpinan DPR RI menetapkan DJSN menjadi mitra Komisi IX.

"Kami akan mengusulkan DJSN dimasukkan dalam mitra Komisi IX, agar bisa berjalan dengan baik dan efektif. Karena saat rapat mereka banyak menyampaikan keluhan agar DJSN dapat diberdayakan. Dalam Undang-Undang (UU) mereka punya kewenangan, tapi dalam prakteknya ada hal-hal yang belum bisa dijangkau," tuturnya. ■



http://duniaabiza.com

(jk.mpi) Foto: Jakarta/hr

# DPR RI dan Parlemen Bahrain Tandatangani MoU Perkuat Kerjasama Berbagai Bidang

Ketua DPR RI Setya Novanto di Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Rabu (30/3), menerima Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the Council of Representatives of Bahrain), H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla. Bagi Indonesia, Bahrain merupakan negara sahabat di kawasan Teluk. Sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Bahrain pada 1976, hubungan bilateral kedua negara terus berjalan baik.

“ Saya mencatat, pada tahun 2000, saat kunjungan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid ke Bahrain, kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Dalam kunjungan Ketua Parlemen Bahrain kali ini, DPR RI dan Parlemen Bahrain sepakat menandatangani MoU untuk saling meningkatkan kerjasama di berbagai bidang,” ungkap Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah, Wakil Ketua dan Anggota Komisi I Meutya Hafiz dan Dave Laksono, Wakil Ketua BKSAP Saifullah Tamliha, Sekjen DPR RI Ahmad Djuned dan Kepala BKD Johnson Rajagukguk.

Dikatakan Novanto, DPR RI mendukung penuh berbagai upaya peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, baik itu terkait bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ia mengucapkan terimakasih atas rencana dukungan Bahrain kepada Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 - 2020.

Di bidang politik, sebagai sesama negara muslim, Indonesia dan Bahrain, melalui forum-forum internasional, termasuk forum antarpemerintah, terus bekerja sama mempromosikan perdamaian di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah.

Terkait masalah terorisme dan gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS, disebutkan Novanto harus menjadi perhatian bersama. Indonesia dan Bahrain, bersama masyarakat internasional lainnya, akan terus bekerjasama mengatasi masalah tersebut.



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Ketua Parlemen Bahrain H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla.

Sedangkan untuk kerja sama di bidang ekonomi, lanjut Novanto, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 mencapai 76,156 juta US dollar. Tahun 2016 meningkat 101,411 juta US dollar. Nilai ini akan terus meningkat di tahun mendatang. Indonesia mendorong pengusaha Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama sosial dan budaya juga akan ditingkatkan, terutama melalui aktivitas *people to people contact*, agar masyarakat kedua negara bisa lebih saling mengenal satu sama lain.

Khusus terkait banyaknya tenaga kerja Indonesia di Bahrain, Ketua DPR RI menyampaikan kepada Ketua Parlemen Bahrain untuk membantu memberikan perlindungan dan hal lain yang diperlukan.

Menanggapi hal tersebut, secara khusus H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla, menyampaikan ungkapan terimakasih kepada warga Indonesia di Bahrain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses pembangunan di Bahrain.

" Parlemen Bahrain memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk pekerja dari Indonesia. Bahrain sudah membentuk pusat pelayanan untuk membantu para pekerja tenaga asing. Selain itu, Parlemen Bahrain juga membuka diri bagi KBRI untuk bekerjasama dan melakukan koordinasi melindungi tenaga kerja Indonesia di sana," kata Ahmed menambahkan. ■

## BKSAP Minta Bahrain Buka Kedubes di Indonesia

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meminta Parlemen Bahrain untuk segera membuka Kantor Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia. Mengingat selama ini Kedutaan Bahrain masih berkantor di Kuasa Usaha Ad Interim (KUALI) Indonesia. Padahal, Kedutaan Indonesia sudah membuka Kantor Kedutaan di Bahrain sejak tahun 2015 lalu.

“ Hal ini disampaikan oleh Anggota BKSAP Itet Sumarijanto saat menerima kunjungan Parlemen Bahrain di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/03).

"Karena kalau kita hanya mengatakan hanya di dalam MoU saja untuk mengadakan investasi energi, ekonomi, industri, dan sebagainya. Kalau tidak ada kedutaannya bagaimana kita bisa mempercepat itu. Kedutaan itu penting," terang politisi dari F-PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Ketua DPR RI bersama Parlemen Bahrain menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang, khususnya ekonomi melalui investasi di bidang energi. Bahrain adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Teluk Arab.

Sebaliknya, Bahrain dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategisnya di kawasan ASEAN yang sejak Januari 2016 telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagai *entry point* pasar tunggal ASEAN.

"Karena kalau kita hanya mengatakan hanya di dalam MoU saja untuk mengadakan investasi energi, ekonomi, industri, dan sebagainya. Kalau tidak ada kedutaannya bagaimana kita bisa mempercepat itu. Kedutaan itu penting"

"Keberadaan Kedutaan itu penting karena harus sejalan dengan kerjasama sehingga keduanya bisa saling berkesinambungan dengan mudah," jelasnya.

Selain itu, politisi senior ini juga mengusulkan agar Bahrain meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia tidak hanya di bidang energi tetapi juga di sektor Pariwisata atau *fashion* Muslim. Terlebih lagi, sejak tahun 2016, Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa bagi warga Bahrain.

Sementara, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dapat menjadi kiblat *fashion* bagi negara muslim di Timur Tengah. "*Fashion* pakaian kita cukup menarik, kenapa tidak coba dikembangkan di Bahrain," tandasnya.

Terkait hal itu, Ketua Parlemen Bahrain H.E. Ahmed bin Ebrahim Rashid Al Mulla mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat permohonan ke pemerintah Indonesia dan akan segera memproses hal tersebut.

"Saat ini pemerintah Bahrain sedang fokus dalam pengamanan terorisme yang sedang melanda negaranya belakangan ini. Selain itu, urusan administrasi antar kedua negara cukup memakan waktu yang lama sehingga memperlambat proses pembukaan kedutaan," paparnya. ■



Anggota BKSAP DPR RI, Itet Sumarijanto



<http://edn.wonderfulengineering.com>

# Pemanfaatan Panas Bumi Perlu SDM dan Teknologi Memadai

Energi panas bumi (gheothermal) kelak bisa jadi energi andalan masa depan di Indonesia. Untuk itu, butuh SDM dan akses teknologi yang memadai agar energi ramah lingkungan tersebut bisa terus berkembang.

**D**emikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (31/03). "Energi panas bumi bisa menjadi sektor andalan apabila ditunjang oleh teknologi yang handal, SDM yang kompeten, serta manajemen yang baik." Hal ini disampaikan Agus saat meninjau PLTP Sarulla berkapasitas 110 MW, tepatnya di wilayah kerja panas bumi Gunung Sibual-bual Pahae Jae, yang sudah beroperasi 18 Maret lalu.

Setelah sukses mengoperasikan unit satu, rencananya pada akhir tahun ini akan dilanjutkan dengan pengoperasian unit dua dan unit tiga pada awal 2018. "Kami berharap kunjungan delegasi hari ini dapat mendorong pengembangan energi panas bumi, sehingga dapat mencapai target pengembangan yang telah dicanangkan bersama," harap Agus

Hadir dalam pertemuan tersebut Dirut Medco Group, Dirut Pertamina Geothermal Energy, dan Predir Medco Power. Di awal sambutannya, Agus menjelaskan, kebutuhan energi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, energi nasional masih mengandalkan energi fosil dan batubara.

"DPR RI melihat, sudah saatnya Indonesia dapat memaksimalkan pengembangan potensi energi terbarukan untuk mengimbangi kebutuhan energi saat ini. Hal ini sejalan dengan nawacita yang diamanatkan Presiden Joko Widodo tentang program prioritas pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam rangka memenuhi energi listrik nasional," papar Agus. ■

(rief,mp), foto : anief/hr

Energi panas bumi bisa menjadi sektor andalan apabila ditunjang oleh teknologi yang handal, SDM yang kompeten, serta manajemen yang baik



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto saat meninjau PLTP Sarulla di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.



# Dewan Apresiasi Kinerja PT Geo Dipa Patuha

Anggota DPR RI Michael Jeno mengapresiasi PT Geo Dipa Energi unit Patuha dalam kunjungan kerja bersama dengan direksi dan pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“ Geo Dipa Patuha dalam mengembangkan potensi energi panas bumi di wilayah Jawa Barat sangat luar biasa besar mencapai 400 MW (Mega Watt),” terangnya di sela-sela peninjauan lapangan ke PT Geo Dipa Energi unit Patuha di Desa Sugihmukti, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Jumat, (31/03) lalu.

PT Geo Dipa unit Patuha sendiri sudah membangun energi pertama panas bumi sebesar 60 MW dalam kurun waktu 2,5 tahun. Untuk mencapai target dari total keseluruhan energi panas bumi sebesar 400 MW.

Politisi PDI-P itu mengharapkan, agar PT Geo Dipa unit Patuha dapat terus mengembangkan pembangunan berikutnya yang belum terlaksana, seperti pembangunan potensi energi panas bumi sebesar 340 MW, yang belum terlaksana. “Saya pikir itu paling utama, karena potensial, bagi kemakmuran masyarakat setempat,” jelasnya.

Namun menurutnya, perlu adanya pengembangan pembangunan karena sebelumnya terjadi kendala masalah internal lalu oleh PT Geo Dipa Energi unit Patuha dengan pihak lain. Lebih lanjut, Komisi XI pun akan membantu menyelesaikan masalah internal dan akan membawa persoalan ini ke rapat kerja dengan pihak-pihak terkait. Antara lain PT Geo Dipa Energi, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal



Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno bersama Tim saat kunjungi PT Geo Dipa Energi unit Patuha di Desa Sugihmukti, Pasir Jambu, Jawa Barat

Kekayaan Negara bisa duduk bersama untuk mencari solusi.

Sebagai Informasi, PT. Geo Dipa Energi (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Saat ini perseroan mengelola lapangan panas bumi unit Patuha dari sisi hulu (up stream) hingga sisi hilir (down stream).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Geo Dipa Patuha Riki F Ibrahim menjawab pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pengembangan lapangan panas bumi Patuha yaitu, permasalahan hukum dengan Bumigas, dan kini Geo Dipa sedang masuk proses pengadilan Arbitrase (Bani).

Selain itu, lahan kontrak area Patuha

PT Geo Dipa unit Patuha sendiri sudah membangun energi pertama panas bumi sebesar 60 MW dalam kurun waktu 2,5 tahun. Untuk mencapai target dari total keseluruhan energi panas bumi sebesar 400 MW

yang sebagian besar dimiliki oleh PTPN VIII, dapat dibeli Geo Dipa dan bukan status sewa lahan yang harganya dapat berubah-ubah. ■

## Komisi IV DPR RI Musnahkan Belasan Ribu Benih Kelapa Sawit

Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Daniel Johan didampingi 16 orang Anggota Dewan meninjau Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Medan di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (31/03).

Dalam kesempatan itu Komisi IV DPR RI memusnahkan 6.295 butir kecamba dan 13.374 tanaman benih kelapa sawit yang tumbuh kembangnya tidak baik karena terkena penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Golongan I. Pemusnahan ini dilakukan dengan menggunakan incinerator di bagian belakang kantor.

"Saya mengapresiasi kerja Badan Karantina Pertanian (BKP) yang telah berhasil menyeleksi bibit kelapa sawit yang berdampak Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tersebut," ujar Hermanto.

Lebih jauh Anggota dari Fraksi PKS ini, meminta masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan agar selektif dalam menanam kelapa sawit terutama yang bibitnya berasal dari impor. "Jika masyarakat menemukan bibit yang terkena OPTK segera saja dimusnahkan," jelas politisi dari Dapil Sumatera Barat I ini.

"Jika bibit yang terkena Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) itu tidak dimusnahkan, maka penyakit akan menular pada batang kelapa sawit yang lain." katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Balai Karantina Pertanian (BKP), Banun Harpini dan beberapa Anggota Dewan menjelaskan, pemilik benih adalah PT. Timbang Deli Indonesia yang ada di Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Selanjutnya Harpini menjelaskan, semua benih didatangkan dari Papua New Guinea (PNG). Ia memastikan kalau 77.932 butir benih kelapa sawit dari Papua New Guinea yang masuk pada periode Agustus-September 2016 bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

"Berdasarkan hasil pengamatan selama enam bulan terakhir di lapangan oleh petugas Pengendali Organisme pengganggu Tumbuhan (POPT) Balai karantina didukung pengujian di laboratorium dengan teknik

pengujian di Biomacular (PCR) tidak ditemukan OPTK sasaran *Phytoplasma Like Organism* (PLO) sehingga dilepaskan. PLO ini sendiri merupakan penyebab *Lethal Yellowing*, penyakit yang paling merusak di dunia seperti di Amerika dan Afrika. Kalau Indonesia masih bebas dari penyakit ini." kata Harpini.

Ia menjelaskan BLO menyebabkan daun menguning dan menyebar dengan cepat. Selanjutnya terjadi pembusukan dan kematian tanaman, sehingga mengancam hasil produksi kelapa sawit.

"Sebenarnya yang kita musnahkan hari ini tanaman benih kelapa sawit yang tidak mengandung OPTK, namun tetap kami musnahkan karena benih ini merupakan calon bibit yang akan dikembangkan. Kami harus memberikan jaminan yang terbaik." ujar Harpini.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan dan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto saat memusnahkan bibit berpenyakit di Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Medan di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara

Direksi PT. Timbang Deli Indonesia. Subagyo menjelaskan kepada Anggota Dewan, pihaknya mendatangkan benih dari Papua New Guinea lantaran mempunyai keunggulan tersendiri dibanding produk yang ada diluar. "Kalau yang dari Papua New Guini dalam kurun waktu dua tahun sudah bisa berbuah, sesuai ijin yang kita pegang, perusahaan kami akan bangun kebun induk." katanya. ■

(f.r.m.p), foto : eka hindra/hic

## Fasilitas RS Tiara Sella Bengkulu Sangat Memadai

Fasilitas RS. Tiara Sella di Kota Bengkulu dinilai sangat memadai untuk memberikan layanan kesehatan bagi para Anggota DPR RI. Layanan bagi masyarakat umum juga sangat baik.

“Ini adalah rumah sakit terbaik di Bengkulu,” nilai Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati, Jumat (31/03). BURT meninjau langsung rumah sakit *provider* ini yang menjadi mitra PT. Jasindo sebagai rumah sakit rujukan untuk para Anggota DPR RI. Kedatangan delegasi BURT DPR RI disambut langsung Direktur rumah sakit.

Delegasi BURT DPR RI mendapat penjelasan memadai dari Direktur RS Tiara Sella tentang kapasitas dan berbagai layanan yang diberikan. Lingkungannya juga terlihat baik



# Pemerintah Pusat Daerah Harus Sinergi Antisipasi Bencana Sumbar

"Kita pertanyakan apa saja yang diharapkan untuk penanggulangan bencana di Sumbar. Karena Sumbar ini rawan bencana, kita berharap Pemerintah Provinsi dan Pusat saling sinergi," ujar Asli Chaidir kepada Parleментарia usai Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Regional Sumatera Barat, Rabu, (29/03).



Komisi VIII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik ke UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Regional Sumatera Barat

**S**inergi itu perlu disegerakan untuk mengantisipasi, rehabilitasi dan rekonsiliasi dapat dilakukan supaya bencana yang terjadi dapat pulih kembali. "Hal itu untuk antisipasi dan melaksanakan bagaimana rehabilitasi dan rekonsiliasi dapat disegerakan supaya bencana yang telah terjadi segera ditangani dan pulih kembali," sambung Chaidir.

Menurut Anggota Dewan yang merupakan putera asli Sumatera Barat ini, kinerja BNPB dan BPBD dalam menangani

bencana di Sumatera Barat sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan, "Kita anggap sudah baik, tapi perlu pembenahan yang segera dilaksanakan supaya tidak berlangsung bencana seperti itu lagi. Kita harus cari penyebab bencana itu. Kalau banjir maka mungkin kali perlu di normalisasi atau bagaimana supaya bencana serupa tidak terulang," jelas legislator fraksi PAN ini.

Sumatera Barat kerap kali dan menjadi daerah langganan bencana, sehingga menjadi tugas berat bagi BNPB dan BPBD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara pusat daerah agar penanggulangan bencana di Sumatera Barat tidak hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah saja. Oleh karena itu Komisi VIII menyatakan kesiapannya untuk saling sinergi dengan penanganan bencana di Sumatera Barat.

Turut serta dalam kunjungan ini yakni Agus Susanto, dan Jalaludin Rakhmat (F-PDIP), John Kenedy Azis (F-Golkar), Anda (F-Gerindra), Linda Megawati (F-Demokrat), Desy Ratnasari (F-PAN), Muslich (F-PPP). Selain itu turut serta mendampingi Direktur Bantuan Darurat BNPB Eko Budiman dan Sekretaris BPBD Sumatera Barat Elyusman. ■

(hs.rmp) foto: hendriahr

dan bersih. Begitu juga fasilitas alat kesehatan yang dimiliki sangat lengkap. Ruang perawatan VVIP yang jadi fasilitas para Anggota DPR RI sempat ditinjau dan dinilai sangat baik.

Dikatakan Elva, layanan kesehatan bagi masyarakat umum tidak kalah baiknya. Apalagi, rumah sakit ini juga sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Jadi rakyat miskin selalu terlayani dengan baik. Sejatinnya begitulah layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dari masyarakat kelas atas hingga kelas bawah selalu mendapat kemudahan akses kesehatan. ■

(mh), foto: husen/ik



Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati

# Masih Ada Masalah Besar dalam Modernisasi Alutsista



Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almayshari saat meninjau Danlanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru Riau



Dalam kurun waktu setahun terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU. Ironisnya kecelakaan pesawat tersebut justru terjadi pada pesawat yang didatangkan dari luar negeri.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan dengan Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi, di ruang rapat Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (30/3/2017).

Menurut politisi Fraksi PKS ini, ada permasalahan besar yang harus direfleksikan oleh institusi TNI dalam melakukan modernisasi alutsista. Masalah tersebut, kata Kharis (panggilan akrabnya) adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan alutsista dari luar negeri. "Ketergantungan ini sangatlah membahayakan," ungkapnya.

Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnasi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia. Embargo tersebut berdampak sangat luas dalam kinerja TNI untuk menegakkan kedaulatan NKRI, karena sebagian besar alutsista yang dipergunakan merupakan produk dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Ketergantungan terhadap pasar luar negeri ini, sambung Kharis, ibarat sebuah lingkaran setan bagi alutsista Indonesia. Bisa dibayangkan rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 30 tahun sehingga mau tidak mau harus bergantung pada komponen luar negeri.

Oleh karena, lanjut Kharis, pada Tahun Anggaran 2017 Kemenhan/TNI perlu memastikan kelayakan alutsista yang akan dibeli dan jaminan akan kelengkapan alutsista dalam sebuah sistem senjata yang utuh.

Menurutnya, UU No 16 Tahun 2012 memang memberikan peluang untuk pengadaan alutsista dari luar negeri apabila industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, kata Kharis, UU tersebut juga mengamanatkan agar dalam melaksanakan peremajaan, hendaknya melibatkan industri pertahanan nasional dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia

(PT. DI) sehingga peremajaan tersebut dijamin kelayakan operasinya oleh PT. DI.

Ia menambahkan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga memiliki peran untuk memberikan semacam jaminan atas kelayakan sebuah alutsista. "Peran KKIP dalam mengawasi kelayakan kontrak setiap alutsista TNI menjadi tanggungjawab yang melekat apakah alutsista yang akan dibeli telah sesuai secara spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional TNI," jelasnya dengan menambahkan, Komisi I DPR RI perlu melakukan evaluasi/pendalaman terkait tergelincirnya pesawat F-16.

Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma Henri Alfiandi merespon, bahwa pesawat tempur F-16 tipe B tergelincir dari landasan pacu sekitar

Indonesia pernah dirugikan oleh adanya embargo alutsista oleh pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 1999 yang melahirkan stagnasi dalam operasionalisasi alutsista di Indonesia

150-200 meter. Pesawat yang tergelincir merupakan pesawat yang baru dibeli pada tahun 1991 hingga 1992. Dijelaskan, sebelumnya pesawat F-16 ini beroperasi di Lanud Iswahyudi, dan operasi di Lanud Roesmin Nurjadin pada April 2016.

Saat itu, kata Henri, pesawat melakukan pendaratan dengan sempurna. Setelah dilakukan pemberhentian sesuai prosedur, upaya ini tidak berhasil yang mengakibatkan pesawat terbalik dan bagian ekor pesawat patah. "Pesawat ini dalam latihan rutin. Latihan yang dimaksud adalah latihan konversi, yakni adanya siswa penerbang dari pesawat jenis Hawk untuk pindah ke pesawat F-16," pungkasnya. ■

# Antusiasme Akademisi dan Masyarakat Sulsel pada RUU SDA Luar Biasa

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said memberikan apresiasi kepada Civitas Akademika Universitas Hasanudin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makasar dan masyarakat pemerhati Sumber Daya Air di Sulawesi Selatan yang telah memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA).

“Antusiasme Unhas, UMI, UNM dan masyarakat pemerhati SDA ini sangat luar biasa,” kata Muhidin saat *Focus Group Discussion* (FGD) Komisi V DPR RI tentang RUU SDA di Kampus Unhas, Makasar, Kamis (30/03).

Pada FGD, sambung politisi Golkar ini, dihadiri 12 pemerhati air. Semua memberikan masukan yang komprehensif terkait RUU ini. Hal ini menurutnya, memberikan harapan pada Komisi V DPR RI agar pada pembahasannya nanti betul-betul memberikan manfaat pada seluruh lapisan masyarakat. Baik masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil, ataupun di pedesaan yang sangat terpencil yang selama ini memiliki masalah kebutuhan airnya sangat relatif.

“Selain itu, bagaimana air ini disamping menjadi obyek juga menjadi subyek bagi kepentingan-kepentingan umum,” tegasnya.

Lebih lanjut legislator dari dapil Sulawesi Tengah ini menegaskan, dalam RUU SDA ini nantinya bagaimana agar air menjadi sumber dari kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, banyak masyarakat kita yang



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said

mendapatkan air apa adanya dan membeli air yang sangat mahal harganya.

“Padahal air ini sebagaimana diamanatkan UUD 1945 kita bahwa seluruh sumber daya alam, air dan udara serta yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Dalam RUU SDA ini, tegasnya, akan dirumuskan bagaimana peran Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah untuk mengawal semua kepentingan agar betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, saat ini Komisi V DPR RI sedang menyusun draft RUU SDA. RUU ini disusun untuk menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu. ■

(sc) Foto: Suca/hr

## Dibutuhkan Sinergitas Antar Sektoral dalam Pembahasan RUU SDA

Dalam Pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA) Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengharapkan sinergitas antar Kementerian Lembaga harus ada, mengingat banyak sektor yang nantinya akan dibahas, salah satunya terkait wilayah desa yang didalamnya terdapat titik-titik sumber air.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus



“ Di dalam pembahasan UU ini nanti kita akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian kemendagri terkait kewenangan Pemerintah Daerah, dan juga Kementerian Desa juga akan kita ajak bicara karena ini menyangkut wilayah desa,” tandas Lasarus.

Hal ini lanjut dia, terkait dengan dimana titik titik sumber air tadi terkait dengan pasal yang mengatur kearifan lokal. Memang disadari juga setelah berada disini, dirinya mencoba buka- buka soal kearifan lokal ditarik ke dalam ada penjelasan tentang pentingnya kearifan lokal ini dimasukkan dalam rumusan RUU. Penting kearifan lokal ini tapi kupasan di dalamnya bahkan hampir tidak ada.

"Untuk itu perlu masukan dari berbagai pihak terutama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan." jelasnya usai melakukan FGD bersama Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Solo, Jawa Tengah, Kamis 30/03.

Terkait perbedaan antara RUU SDA yang sedang dalam pembahasan Komisi V DPR RI saat ini dengan UU SDA Nomor 7 Tahun 2004, Lasarus memaparkan perbedaannya, menurutnya banyak penyempurnaan di dalam RUU SDA yang sedang dibahas.

"Salah satunya di UU No. 7 Tahun 2004 dulu tidak diatur sumber air sungai dibawah

tanah itu dalam RUU sekarang sudah pasti tidak diatur. Soal kearifan lokal juga tidak diatur ini ada beberapa perbedaan. Yang kedua, hal yang prinsip bahwa komersialisasi di UU ini nanti tidak ada lagi, kita akan betul betul mengimplementasikan pasal 33 yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jadi di UU yang baru itu jadi betul betul arah itu yang kita kejar," pungkas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kalbar ini. ■

(ndyimp) Foto: Nadya/ik

## RUU SDA Dibentuk Untuk Atasi Persoalan Hak Guna Air

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, saat ini masih dominannya perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air di daerah yang mengakibatkan warga daerah sekitar khususnya petani tidak bisa mengairi sawah mereka.

“ Contohnya di Sukabumi, Cianjur dan beberapa daerah di Jawa Timur, perusahaan Danone itu menguasai hampir seluruh sumber air. Ini kan berdampak pada petani, berdampak pada ketahanan pangan otomatis akan berdampak pada kedaulatan pangan. Otomatis juga berdampak pada kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik. Jadi bicara tentang air sebenarnya kita juga bicara soal kedaulatan karena kita sering juga mendengarkan Poun yang berbunyi kalau kita ingin menguasai suatu negara maka kita kuasai sumber energi,” papar Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB) usai mengikuti FGD terkait RUU SDA di Solo, Kamis (30/3)

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo menegaskan akan membuat RUU SDA sekomprensif mungkin, agar tidak kembali di *judicial review*, mengingat harapan masyarakat terhadap RUU tersebut sangatlah tinggi. "Makanya kita ingin mengundang pakar, tadi kan kita ketemu dengan pakar perguruan tinggi kemudian pakar pengguna air kemudian ada masyarakat ada LSM DCI ada LSM pemerhati masalah air. Kita undang mereka agar masukan-masukan itu menjadi bahan pelengkap untuk membuat UU yang komprehensif sehingga tidak gampang untuk di *judicial review*. Mudah-mudahan UU ini jadi baik dan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap

pengaturan air sehingga mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu poinnya," harap Wakil Ketua Komisi V dari F-PKS ini. ■



Anggota Komisi V DPR RI. Neng Eem Marhamah Zulfa

(ndyimp) Foto: Nadya/hr

# Komisi X DPR RI Setujui RUU Sisbuk

Komisi X DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) untuk disahkan dalam Pembahasan Tingkat II atau Rapat Paripurna Dewan. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun dan mengembangkan budaya literasi, sehingga mampu bersaing di tingkat global.

**D**emikian kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Agama, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (04/04).

Dalam laporannya, Ketua Panja RUU Sisbuk sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, sebagai upaya melaksanakan upaya konstitusi Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5,

Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia.

"Dalam upaya peningkatan budaya literasi, perlu perhatian khusus dari pemerintah guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global untuk penyelenggaraan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem perbukuan," jelas Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, pembahasan RUU Sisbuk dalam Panja menyepakati bahwa konsep dan arah kebijakan perbukuan hanya mengatur norma pokok untuk menjawab permasalahan

nasional. Pokok-pokok pengaturan itu menjamin ketersediaan buku bermutu, murah dan merata, baik buku umum, maupun buku pendidikan, yang dalam hal ini buku teks dan buku pendamping.

"Yang dimaksud dengan mutu, adalah bahwa buku bermutu harus memenuhi standar isi, penyajian, desain, grafika, yang telah ditetapkan dalam setiap proses tahapan, yaitu perolehan naskah buku, pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku," imbuh Sutan. Sementara yang dimaksud dengan murah, yaitu buku terjangkau dari segi harga sesuai dengan daya beli masyarakat, terutama buku-buku pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan yang dilakukan Pemerintah.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra disaksikan sejumlah Anggota DPR RI menandatangani draf RUU Sisbuk



Dalam upaya peningkatan budaya literasi, perlu perhatian khusus dari Pemerintah guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global untuk penyelenggaraan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem perbukuan

"Sehingga dibutuhkan politik anggaran perbukuan yang fokus pada penyediaan buku teks utama, tanpa dipungut biaya yang digunakan dalam proses pembelajaran 9 dan 12 tahun," tambah Sutan.

Sementara yang dimaksud dengan merata, yaitu buku tersedia dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk buku-buku untuk penyandang disabilitas, dan daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) di Indonesia.

"Draf RUU Sisbuk versi 3 April 2017 terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal. Pembahasan RUU Sisbuk selama 10 bulan oleh Panja telah mengalami banyak dinamika dan romantika. Dan menghasilkan rancangan yang maksimal tentang sistem perbukuan," tutup politisi asal dapil Jambi itu.

Sebelumnya, 10 Fraksi DPR RI menyampaikan pandangan mini fraksi. Kendati memberikan beberapa catatan, seluruhnya menyetujui agar RUU Sisbuk untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II atau Paripurna. ■

(sf/sc)/foto:kresno/hr.

## Komisi III DPR RI Dukung Penguatan Fungsi Kelembagaan Komnas HAM

Komisi III DPR RI mendukung penguatan fungsi kelembagaan Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III dengan Komnas HAM di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

“ Kami meminta Komnas HAM lebih proaktif dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Agar undang-undang itu lebih mengakomodir dan memperkuat fungsi Komnas HAM,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaedi Mahesa yang memimpin rapat saat itu.

Penguatan fungsi Komnas HAM itu, lanjut Desmond, seperti penguatan kelembagaan, pemberian kewenangan, pemanggilan paksa, penguatan rekomendasi yang selama ini banyak tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda itu juga meminta Komnas HAM lebih fokus dan lebih serius dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Selain itu, ia meminta Komnas HAM lebih aktif lagi dalam melaporkan hasil investigasi dalam perkara pelanggaran hak

Komnas HAM lebih fokus dan lebih serius dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat.

asasi yang ditangani. Baik itu soal terorisme maupun sengketa tanah.

"Komisi III meminta Komnas HAM secara periodik melaporkan setiap hasil investigasi dari pengaduan yang telah diterima oleh Komnas HAM akibat hilangnya rasa keadilan, seperti penindakan pelanggaran HAM di bidang terorisme dan pertanahan," pungkasnya. ■

(Ayo), Foto: Arief/JK



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaedi Mahesa

## Pansus Pemilu Siapkan 3 Opsi Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan dalam politik menjadi salah satu isu krusial yang sedang dibahas anggota Pansus RUU Pemilu. Sejak pembahasan RUU, Pansus sudah mengundang kelompok aktivis perempuan untuk mendapat masukan-masukan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan.

Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2014-2019 sebesar 18 persen. Dalam UU Pemilu, pencalegan diatur agar memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

"Dalam pembahasan yang dilakukan pansus, muncul tiga opsi untuk meningkatkan keterwakilan di DPR RI," ujar Anggota Pansus Hetifah Sjaifudian dalam keterangan persnya, Kamis (30/03) di Jakarta.

Opsi pertama ialah keterwakilan perempuan diatur seperti UU sebelumnya, yaitu memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalegan.

Sementara, lanjut Hetifah, opsi lainnya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan



Anggota Pansus Hetifah Sjaifudian

dengan menggunakan sistem *zipper* murni, yaitu pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Artinya, nomor urut "selang-seling", misalnya, nomor urut 1 laki-laki, nomor urut 2 perempuan dan seterusnya.

Opsi ketiga, meningkatkan keterwakilan

perempuan dengan menempatkan caleg perempuan nomor urut 1 di 30 persen dapil. 30 persen dapil tersebut adalah dapil yang parpolnya mendapat kursi pada Pemilu sebelumnya.

"Kami mendukung keterwakilan perempuan dengan menempatkan perempuan di nomor urut 1 di 30 persen dapil, serta penerapan *zipper* murni dalam pencalegan," ujar Politisi dari F-Golkar itu.

Di tempat yang berbeda, Anggota Pansus Johnny G. Plate mengatakan sebaiknya afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen tidak perlu dimasukkan ke dalam hukum positif. Ia justru menyarankan, agar keterwakilan perempuan terakomodir maka harus ditetapkan dalam keputusan partai politik, sehingga setiap parpol bisa melaksanakan hal itu.

"Secara prinsip, kami tidak tolak tapi undang-undang harus ada konsekuensinya, pada saat dia masuk ke hukum positif maka dia imperatif. Kalau imperatif bentuknya, maka harus ada sanksi pelanggaran. Nah, kami sudah lakukan itu tanpa ada imperatif, namun kesadaran," jelas politisi dari F-Nasdem ini.

Lebih lanjut, Johnny menyebutkan jika norma tersebut dimasukkan ke dalam RUU maka sama saja negara tidak meningkatkan kemampuan sadar diri karena selalu membuat aturan yang ada sanksinya. "Negara tidak bisa dibangun begitu terus," tandasnya. ■

(enn,mp) Foto: Jakarta/rr

## Kekerasan Anak dan Perempuan di Kalbar Makin Meningkat

Ketua tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI Zulfadhli F-Golkar mengatakan, kurangnya dukungan terhadap sarana dan prasarana (sarpras) penunjang di Kalimantan Barat, terutama pemulihan pasca korban kekerasan perempuan dan anak.

“Sarpras masih sangat minim, sehingga pelayanan terhadap pemulihan korban ini masih sangat lemah. Akibatnya, kekerasan perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat,” ujarnya saat pertemuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar dan jajaran di Pontianak, Rabu (29/03) lalu.



Ketua tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI, Zulfadhli

Karena itu Zulfadhli mendesak kepada pemerintah pusat dan daerah agar memberikan perhatian untuk sarana dan prasarana penunjang, sehingga korban kekerasan segera mendapat pemulihan

Politisi Golkar ini juga menyayangkan tentang penurunan anggaran di tahun ini khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Di satu sisi, ia senang badan struktur organisasi yang di tingkatkan statusnya menjadi dinas, namun dengan terbentuknya dinas menjadi bertambah

beban kerja, dan bertambah program-program malah tidak mendapatkan dukungan dana yang cukup.

"Kita mendorong meminta Gubernur Kalimantan Barat untuk lebih meningkatkan lagi anggaran, bukan malah menurunkan," ucapnya.

Di lain sisi kinerja dinas PP-PA di provinsi ini masih belum maksimal, karena masih sangat jauh dari kebutuhan karena terkendala anggaran yang semakin menurun.

"Harapan ke depan agar Gubernur mengembalikan lagi anggaran tahun yang lalu yang hampir Rp6 M untuk menunjang program maupun sarpras yang ada agar pelayanan bisa lebih maksimal lagi," tegasnya.

Dia menambahkan, di Kalimantan Barat belum tersedianya selter khusus untuk pasca pemulihan korban kekerasan. Selter itu sarpras yang paling penting, makanya harus segera di bangun untuk penanganan pemulihan korban kekerasan. ■

(az.mp)/fotocazka/hr

## BKD DPR RI Beri Masukan Terkait Perubahan Tata Tertib kepada DPRD Probolinggo

Perubahan tata tertib (tatib) di DPRD dapat dilakukan jika ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, atau ada kebutuhan dalam mekanisme DPRD yang menghendaki perubahan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI, Johnson Rajagukguk saat menerima kunjungan anggota Pansus 2 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo di ruang rapat BKD, Senayan, Jakarta, Kamis (30/03).

“Pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo bermaksud meminta masukan terkait bagaimana sebenarnya melakukan perubahan tata tertib yang ada. Secara formil perubahan tata tertib itu dapat dilakukan karena ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, atau ada kebutuhan dalam mekanisme DPRD yang menghendaki perubahan,” ungkap Johnson.

Johnson menilai kesulitan yang dialami oleh DPRD Kota Probolinggo ketika kelak akan mengubah tata tertib terjadi karena pasangan kerja Komisi-komisi yang ada di DPRD itu didasarkan pada pembedangan, bukan berdasarkan instansi atau lembaga.

"Selama ini DPRD Kota Probolinggo mendasarkan pasangan kerja komisi-komisinya atas bidang-bidang, bukan pada instansi atau lembaga. Hal ini akan sangat menyulitkan, karena basis anggaran didasarkan pada instansi atau lembaga, bukan pada bidang kerja misalnya bidang kesejahteraan masyarakat atau bidang lainnya." paparnya.

Dengan demikian, lanjut Johnson, satu instansi atau lembaga yang ada di Pemerintahan Kota Probolinggo bisa memiliki dua komisi yang menjadi mitra kerjanya.



Kepala BKD DPR RI, Johnson Rajagukguk menerima kunjungan Anggota DPRD Kota Probolinggo

"Di sini saya memberi masukan agar memilih mitra komisi di DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur berdasarkan instansi atau lembaga saja. Mengingat basis anggaran di Pemda itu berdasarkan instansi. Bukan pada bidang kerja. Sehingga akan memudahkan ketika akan melakukan pembahasan anggaran di DPRD," tambahnya.

Sementara itu Ketua Pansus 2 tentang Tata Tertib DPRD Probolinggo, Roy Amran mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana melakukan perubahan Tata Tertib di lembaganya. Mengingat selama ini kerap terjadi pembahasan anggaran dan program sebuah

lembaga di dua komisi yang berlainan di DPRD Kota Probolinggo.

Terkait hal itu, Johnson mengatakan bahwa Komisi-komisi yang ada di DPR RI memilih mitra kerjanya berdasarkan instansi atau lembaganya, bukan kepada bidang kerja semata. Namun jika kemudian komisi yang lain ingin mengundang instansi atau lembaga yang bukan merupakan mitra kerja komisinya tetap dimungkinkan. Tetapi terlebih dahulu harus melalui mekanisme ijin atau persetujuan dari Pimpinan DPR RI dan Komisi terkait yang menjadi mitra kerja instansi atau lembaga tersebut. ■

(Ayu), Foto: Rizka/hr

## Pemerintah Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan nelayan bukan sekedar sebuah profesi namun sudah jalan hidup, maka Peraturan Pemerintah harus fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan bukan malah merugikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengenai alat tangkap harus ditinjau ulang, karena banyak penolakan dari masyarakat nelayan. Permen itu dianggap merugikan, tidak hanya nelayan tetapi ibu-ibu penyortir ikan yang kehilangan mata pencaharian.

"Pemerintah berbicara bagaimana melestrikan laut

sebagai sumber ekonomi nasional, jadi yang dipikirkan dari Sabang sampai Merauke, namun kultur setiap daerah berbeda. Di kabupaten Lamongan Permen 71 tidak cocok," kata Viva di Lamongan, Jumat (31/03).

Maka dari itu, ia berharap peraturan yang dibuat harus sesuai kultur nelayan, jangan sampai mereka menggunakan teknologi baru namun berdampak buruk, hasil berkurang dan merugikan nelayan. Dirinya berharap



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi

kebijakan Pemerintah bisa fokus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga ekosistem laut.

"Menangkap ikan sebagai mata pencaharian harus terus berjalan, tapi di sisi lain ekosistem laut harus tetap dilestarikan, KKP harus mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini," ujarnya. Pemerintah membuat kebijakan itu untuk mengatur, membina dan merawat. Agar para

nelayan bisa mencari dan memberikan nafkah keluarga tanpa kekurangan ikan.

Hal senada disampaikan wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto yang mengatakan pemerintah dalam membuat peraturan harus memperhatikan kultur yang berbeda di setiap daerah. Permen 71 tidak cocok di Lamongan, malah membuat masyarakat nelayan rugi.

"Peraturan ini harus ditinjau ulang sebab berdampak luas, nelayan tidak bisa melaut dan hasil tidak maksimal. Hal ini mempengaruhi sektor perikanan lain. Misalnya buruh kelihangan pekerjaan," ia menegaskan. ■

(ria.rmp/fotografia/hr)



<https://ptfirfinancindoberjangkablog.wordpress.com>

## Komisi IV DPR RI Temui Aksi Massa Tolak Reklamasi Pantai Losari

Kunjungan Komisi IV DPR RI di lokasi Reklamasi kawasan Pantai Losari Makassar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Pulau Lae-lae dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menyuarakan penolakannya terhadap Reklamasi pantai, Jumat (31/03). Dalam tuntutan mereka meminta agar Reklamasi di kawasan Pantai Losari dihentikan karena telah merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

"Jangan menyebut pengerukan di Takalar saja. Pulau Gusung sudah hampir habis pasir putihnya kalian keruk, di sana tinggal batu semua. Jangan bohongi publik," teriak Agus, Ketua Karang Taruna Pulau Lae-lae.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel Muhammad Al Amin menyampaikan agar proyek Reklamasi kawasan Pantai Losari disegel dan dihentikan karena telah merusak ekosistem laut di kawasan tersebut dan sekitarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron sampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan menunggu hasil kajian Tim teknis dari KKP dan KLH terkait Reklamasi di kawasan Pantai Losari tersebut.

"Kita akan tunggu hasil analisis Tim Teknis KKP dan LHK terkait dengan Reklamasi di kawasan Pantai Losari, apakah sudah sesuai dengan perundangan, amdalnya sudah terpenuhi

## Komisi VIII DPR RI Tinjau Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

Melihat secara langsung kondisi obyektif sistem pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi fokus perhatian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Yogyakarta.

**H**al tersebut dikemukakan Noor Achmad selaku Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI saat menggelar pertemuan dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Rabu (29/03).

Noor Achmad menambahkan bahwa kehadiran Komisi VIII DPR RI juga dalam rangkaian tugas pengawasan, anggaran dan legislasi. Untuk menyerap berbagai masukan mengenai kebijakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

"Apakah selama ini para pendamping sudah cukup profesional dan efektif dalam menangani masalah-masalah sosial masyarakat," ungkap politisi Golkar ini.

Selain mengawasi, Komisi VIII DPR RI juga bertanggung jawab atas anggaran para mitra kerja, apakah anggarannya cukup memadai atau masih kurang sehingga



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad saat memimpin pertemuan dengan BBPPKS Regional III Yogyakarta

kunjungan kerja memperoleh informasi dan data yang aktual, tambahannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang belum lama dilantik ini juga menyoroti sejauh mana struktur organisasi, data program kerja, target sasaran, data peserta serta serapan anggaran serta kendala yang dihadapi BBPPKS Regional III Yogyakarta.

Purwomartani, Yogyakarta.

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI terdiri Noor Achmad (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VIII), Kuswiyanto, Bisri Romli, An'in F Mahrus, Mohammad Iqbal Romzi, Itet Trijadjati Sumaridjanto, Diah Pitaloka, Endang Maria Astuti dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. ■

(ojl,mp), foto: ojis/hr

serta aspek ekosistem, hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan," ungkap Herman.

Lebih lanjut, Herman jelaskan bahwa Komisi IV DPR RI telah membentuk Panja Pengawasan untuk mengawasi 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional, salah satunya reklamasi di kawasan Pantai Losari.

"Kunjungan kita kesini untuk meluruskan tata laksana proyek reklamasi kawasan Pantai Losari sudah sesuai aturan atau belum, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar," ungkapnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Proyek CPI Suprpto Budisantoso sampaikan bahwa semua dokumen perizinan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Perkara hukum CPI juga telah diputuskan pengadilan, sehingga reklamasi bisa dilanjutkan. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat temui pendemo tolak reklamasi di Makassar

(skr,mp), foto: singgih/hr

# Bahas Digitalisasi Media Baleg Berikan Tiga Opsi

Badan Legislasi DPR RI menyiapkan tiga opsi model bisnis untuk menyelesaikan perkara migrasi layanan TV *analog* menjadi *digital*, yakni melalui model *single multiplexer*, *multiple multiplexer* dan *hybrid multiplexer*.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam RDPU dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/04).

"Yang terpenting dalam RUU Penyiaran ini adalah sistem yang akan kita gunakan dalam pengaturan frekuensi agar memberi manfaat sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945," ungkap politisi dari F-Gerindra itu. Ia menambahkan, dalam sistem *single multiplexer*, penguasaan frekuensi diberikan kepada negara atau badan independen yang ditunjuk negara. Selanjutnya, stasiun televisi menyewa kanal dalam frekuensi tertentu.

Sementara, dalam *single multiplexer* yang

saat ini diterapkan, frekuensi dikelola perusahaan pemilik stasiun TV yang ada saat ini.

"*Multiple multiplexer* seperti yang ada sekarang, negara memberikan frekuensi kepada stasiun televisi dan hanya menerima pendapatan berupa pajak. Jika ada TV baru, maka akan menyewa kepada perusahaan yang sudah mendapatkan frekuensi," jelas Supratman.

Adapun opsi ketiga yaitu, *hybrid multiplexer*, artinya jika ada 6 frekuensi maka 3 frekuensi akan dikuasai oleh negara



Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas

(lembaga penyiaran) sementara 3 lainnya akan di lelang ke pihak swasta.

"Menurut saya, pilihan yang paling tepat dalam rangka pasal 33 yaitu menggunakan *single multiplexer*. Namun, walaupun tidak bisa *single multiplexer*, maka yang bisa digunakan adalah *hybrid multiplexer*. Ini salah satu cara untuk mengurangi monopoli," papar politisi dapil Sulteng ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan dengan adanya pengaturan frekuensi, maka bukan hanya mencegah praktik monopoli, namun disisi lain diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. "Kita berharap dengan sumber daya terbatas, negara bisa mendapatkan penerimaan bukan hanya sektor pajak semata," tandasnya.

Dalam RDPU tersebut, Ketua ATVSI Ishadi menyerahkan draf usulan yang berisi 11 saran atas isu krusial dalam RUU Penyiaran. Diantaranya, pengelolaan frekuensi, pembatasan kepemilikan media, pengaturan isi siaran dari stasiun asing, dan pengaturan siaran iklan. ■





# Pendidikan dan Pelatihan untuk Menuju Parlemen *Modern*

Ketua DPR RI Setya Novanto menekankan, pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling mendasar untuk menuju Parlemen *Modern*. Sehingga, dengan diklat yang dilakukan kepada sistem pendukung dapat mendukung fungsi-fungsi Kedewanan. Hal itu yang mendorong DPR RI untuk segera mewujudkan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

**D**emikian dikatakannya saat meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo di Bogor, Jawa Barat, Senin (03/04).

"Pendidikan ini perlu adanya sebagai suatu hal yang mendasar. Karena waktu saya tinjau di luar negeri, di parlemen negara lain sudah melakukan diklat. Ini tentu kita jangan kalah. Sehingga SDM kita, termasuk Tenaga Ahli kita totalnya ribuan itu, harus ditatar," jelas Novanto.

Politisi F-PG itu mengakui, DPR RI belum memiliki Pusdiklat, karena belum terpenuhinya proses administrasi, termasuk akreditasi. Padahal, hampir semua Kementerian dan Lembaga sudah mempunyai Pusdiklat yang baik.

"Kita ingin membangun secepatnya yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan diklat Kesetjengan, BKD, Anggota Dewan, termasuk DPRD dari seluruh Indonesia," imbuh Novanto, sembari mengatakan bahwa Pusdiklat ini memang sudah direncanakannya sejak awal menjabat Ketua Dewan.

Politisi asal dapil NTT itu berharap, pembangunan Pusdiklat agar segera terlaksana secepatnya. "Kita mohon doa restu dari semua pimpinan komisi yang mewakili fraksi, dan Kesetjengan, kita berdoa supaya ini bisa terwujud, jangan kalah dengan yang lain," tutup Novanto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR

RI Achmad Djuned melaporkan, Pusdiklat DPR RI adalah pengembangan organisasi Setjen dan BKD yang sebelumnya hanya Eselon III, dan kini menjadi Pusdiklat setingkat Eselon II.

"Pengembangan organisasi tentunya membawa konsekuensi untuk meningkatkan peran. Sesuai dengan arah kebijakan Pusdiklat untuk meningkatkan peran kompetensi dan profesionalisme SDM Setjen DPR RI dan BKD maupun tenaga pendukung di Setjen DPR RI dan BKD," jelas Djuned.

Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan, bahwa Setjen dan BKD harus meningkatkan fungsi pelayanan kepada Dewan, khusus untuk Persidangan. Saat ini, pegawai di Setjen DPR RI dan BKD terdiri dari 1325 PNS, PTT sebanyak 5226 pegawai. "Ini menjadi tantangan dan amanah yang harus kami lakukan," imbuh Djuned.

Djuned menambahkan, perlu adanya akreditasi oleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk di akreditasi, diantaranya adalah tenaga dari pendidikan, pembiayaan, dan adanya fasilitas.

Saat ini, jelas Djuned, DPR RI sudah mempunyai Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo,

yang memiliki lahan seluas 5,4 hektar. Sebagian sudah dibangun wisma dan ruang rapat, dengan fasilitas 64 unit wisma, 4 ruang rapat, dan ruang serbaguna.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan kepada Pimpinan Dewan dan BURT maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sekiranya bahwa sebagian ataupun untuk wisma bisa dikembangkan menjadi Pusdiklat bagi pegawai Setjen DPR RI maupun pendukungnya," harap Djuned.

Turut hadir dalam peninjauan ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah (F-PKS), Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri (F-PKB), Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro (F-PG), Anggota Komisi IV DPR RI Vivi Sumantri Jayabaya (F-PD), Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said (F-PG), Anggota Komisi VII DPR RI Hadi Mulyadi (F-PKS), Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (F-PAN), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-PG), dan Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal (F-PKS).

Kemudian dari Pimpinan BURT DPR RI, hadir Ketua BURT Roem Kono (F-PG) dan Agung Budi Santoso (F-PD). Hadir juga perwakilan dari Badan Anggaran, yakni Ridwan Bae (F-PG) dan Robert Kardinal (F-PG). ■

(isi.scj/foto:jake/hr)



Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo Bogor



Pimpinan DPR RI didampingi sejumlah Anggota DPR RI meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Setjen dan BKD DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo di Bogor Serjin (3/4). Foto: Jaka

Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Agung Budi Santoso meninjau RS Santa Anna Kendari, Sulawesi Tenggara, (03-05/04). Foto: Andri



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Daniel Johan melakukan pemusnahan bibit kelapa sawit dan peresmian import perdana sarang burung walet (31-02/03). Foto: Eka